

BAB V.
MODEL AKSI KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH CERDAS
MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS SISTEM INFORMASI SEKOLAH

A. Pendahuluan

Secara empirik para pengelola sekolah melakukan aktivitas belajar masing-masing. Kerja sama dalam bentuk tim belum banyak dilakukan. Upaya mengintegrasikan sumber daya pada sistem sekolah juga masih sangat terbatas sekali pun teknologi yang ada pada saat ini berpotensi untuk memberikan dukungan pada peningkatan kerja sama pada ruang lingkup sistem sekolah dengan mengintegrasikan sumber daya bagi peningkatan mutu pembelajaran warga sekolah.

Berkaitan dengan itu diperlukan kebijakan untuk mengembangkan sistem integrasi dalam mengembangkan daya belajar seluruh warga sekolah dalam konteks kesisteman. Secara ideal kebijakan ini harus menjadi sumber daya yang berkontribusi positif pada setiap sekolah dan menerima kebijakan itu sebagai rencana tindakan yang dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan. (Gupta, 1985: 32). Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi sekolah sebagai bentuk implementasi MBS merupakan bentuk kewenangan lokal yang luas dalam meningkatkan kontribusi seluruh warga sekolah dalam mendorong peningkatan pencapaian tujuan. Salah satu bentuk partisipasi yang besar adalah dalam pengambilan keputusan bersama.

menetapkan kebijakan lokalnya secara mandiri dalam bentuk kewenangan pengambilan keputusan (Oswald, 1995 p.1)

Untuk memperoleh keputusan yang efektif maka sekolah harus dapat meningkatkan pemahaman pengelola sekolah. Karena keputusan yang efektif harus berdasar pada data yang objektif. Tellefsen (1990:1) menekankan bahwa efektivitas dan efisiensi manajemen akan terwujud jika semua pihak yang terlibat dalam organisasi memahami dengan baik tugas dan tanggung jawabnya serta memahami dengan baik alur tugasnya. Pengetahuan harus menjadi dasar untuk memperoleh keterampilan yang terbaik (Perkins 1992:5).

Sebagai konsekuensi dari itu maka sekolah harus menjadikan seluruh warganya menjadi warga pembelajar, warga yang menguasai informasi. Oleh karena itu kebijakan meningkatkan daya sekolah untuk menjadikan warganya menjadi komunitas yang cerdas sekaligus mengembangkan organisasi yang cerdas pula. Untuk itu mendorong agar seluruh warganya menjuadi komunitas pembelajar sehingga berpengaruh pada masing-masing orang sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif (Danim 2003:9).

Salah satu unsur penting dalam mengembangkan sekolah sebagai sistem yang cerdas adalah ketersediaan informasi, mendorong kemandirian seluruh komunitas untuk menjadi warga pembelajar. Untuk mendorong sekolah menjadi individu-individu, komunitas, dan lembaga yang cerdas seperti yang dikemukakan Johnson dan

James H. pendidikan yang efektif didukung oleh keputusan yang efektif dan keputusan itu harus berbasis data informasi yang akurat. Pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memberdayakan program yang lahir dari pengolahan data sekolah yang mengarahkan pembaharuan pendidikan dalam melakukan inovasi berbasis data.

Dalam hal ini sekolah harus mampu membantu mengkoleksi data untuk menjamin program pengelolaan data, maka komponen pengelolaan data harus merepleksikan (1) Tujuan untuk mendapatkan data yang akurat, jelas, lengkap dan dapat terdokumentasikan (2) terintegrasi sehingga integritasnya tidak dikompromikan (3) Transparan, artinya dalam mengkoleksi data menggunakan metode, sumber data, asumsi, outcomes, dan pengguna dapat memahami bagaimana data dapat digunakan (4) Dapat direproduksi sehingga dalam pengkoleksian dengan metode dokumentasi, asumsi, dan sumber data yang dapat diperbandingkan. (5) Kelengkapan berarti data lengkap dapat berguna.

Dari penelitian memperoleh hasil bahwa keempat hipotesis mengenai pemahaman pengelola sekolah tentang regulasi sumber daya pendidikan sebagai berikut:

- Pemahaman pengelola sekolah mengenai pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap peningkatan efektivitas kinerja out put manajemen sekolah dengan besar pengaruh masing-masing sebesar 17.5 %.
- Pemahaman pengelola sekolah mengenai pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola kebijakan tentang pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap peningkatan efektivitas kinerja out put manajemen sekolah dengan besar pengaruh masing-masing sebesar 21,5%.



- Pemahaman pengelola sekolah mengenai pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola kebijakan tentang pengelolaan sarana-prasarana berpengaruh positif terhadap peningkatan terhadap peningkatan efektivitas kinerja out put kinerja manajemen sekolah dengan besar pengaruh sebesar 16,9%
- Pemahaman pengelola sekolah mengenai pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola kebijakan tentang pengelolaan kurikulum berpengaruh positif terhadap peningkatan terhadap peningkatan efektivitas kinerja out put sebesar 20.1%.

Dari hasil penelitian itu memberikan pemahaman yang cukup terpercaya bahwa pengetahuan pengelola sekolah terbukti berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja sekolah sehingga peningkatan mutu penguasaan informasi serta meningkatkan kemampuan sekolah menyediakan data sebagai bahan pengambilan keputusan sangatlah penting. Oleh karena itu membangun sistem informasi sekolah berbasis komunitas merupakan bagian dari strategi dalam meningkatkan kecerdasan sekolah sebagai sistem.

B. Istilah dan definisi

Sekolah adalah tempat siswa dapat belajar (Fakry Gafar)

Cerdas mengandung arti memiliki kemampuan untuk memahami dan memecahkan masalah dengan cepat serta memiliki kekuatan dalam menjelaskan sesuatu dengan alasan yang tepat dan menggunakan referensi secara efektif, menguasai sesuatu dengan cepat (<http://www.answers.com/topic/intelligent>)



Sekolah cerdas adalah lembaga pendidikan yang bergerak dalam nuansa keterbukaan dan kebebasan untuk memperoleh informasi dan terbuka dengan berbagai bentuk perubahan, yang mengkoordinasikan seluruh anggotanya untuk meraih sukses. (The Intelligent Orgnazation, by Gifford & Elizabeth Pinchot, <http://www.pinchot.com/MainPages/BooksArticles/IntelligentOrganization/TheIntellOrg.html>, 24/8/2007). Pengertian lain diperoleh dari Merriam Webster On-Line yang menyatakan dapat mencetak sesuatu material dari sinyal digital.

Sistem merupakan sekelompok komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi secara regular menentukan kinerja, merupakan wujud prosedur organisasi, metode (<http://www.webopedia.com/TERM/S/system.html>, 24 Agustus 2007).

Teknologi adalah sebuah konsep yang luas yang yang menyangkut pengetahuan dan pemakaian perkakas, mata uang, seni, dan bagaimana mengembangkan kemampuan dalam beradaptasi maupun dalam mengendalikan lingkungan. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Technology>)

Data dan informasi; data adalah materi faktual yang digunakan sebagai dasar untuk diskusi atau pengambilan keputusan adalah ; informasi. Informasi berdasar fakta untuk analisis atau bahan untuk membangun argumen atau alasan. (<http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/data>.)

Sistem Informasi adalah sistem manusia, himpunan data dan arsip, himpunan informasi tentang aktivitas organisasi baik yang dikelola secara manual maupun digital. Juga dapat berarti sistem yang mendukung aplikasi data secara intensif (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/236/description#description)

Sistem Informasi Sekolah adalah himpunan data dan arsip, himpunan informasi tentang aktivitas sekolah baik yang dikelola secara manual maupun digital dan sistem yang mendukung aplikasi data dengan sistem pengelolaan secara intensif (http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/236/description#description)

C. Maksud dan Tujuan

Pengelola sekolah berpartisipasi aktif dalam pengembangan sekolah cerdas melalui peningkatan kapasitas sekolah dalam mendorong kemandirian belajar dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan pada tingkat individu, organisasi, dan institusi dengan dukungan penguatan sistem informasi sekolah.

Tujuan umum tersebut seluruh pengelola sekolah diharapkan dapat menguatkan tingkat kecerdasan institusi dalam meningkatkan penyediaan data untuk menetapkan kebijakan, penguatan daya belajar, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kecerdasan lembaga dalam meningkatkan daya kompetitifnya dalam

member pelayanan terbaik kepada siswa. Pengelola sekolah diharapkan dapat mengembangkan kapasitasnya dalam pemahaman tentang bagaimana seluruh sumber daya dikelola secara efektif. Untuk itu pengetahuan seluruh pengelola sekolah harus ditingkatkan dari waktu ke waktu pada kenadali program yang logis dan sitemantis.

Penyusunan program pengembangan sekolah cerdas meliputi lima tujuan khusus sebagai berikut :

- a. Terwujudnya hasil studi lapangan tentang analisis lapangan tentang kekuatan dan kelemahan untuk mewujudkan harapan mengembangkan sekolah cerdas pada tingkat sistem sekolah dan level sekolah.
- b. Terumuskannya standar prosedur pengembangan sekolah cerdas pada tingkat sekolah maupun pada level sistem sekolah
- c. Terlaksananya pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan dasar penggunaan computer, peningkatan kompetensi aplikasi multi media, manajemen dokumen, dan sistem informasi sekolah.
- d. Terlaksananya program pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi sekolah melalui pelaksanaan e manajemen dan e learning.
- e. Terlaksananya program pendampingan secara berkala untuk meningkatkan pencapaian tujuan.

- f. Terlaksananya evaluasi berkelanjutan sebagai sumber bahan evaluasi pencapaian program dan perbaikan program.

D. Prasyarat Keterlaksanaan Program

Yang menjadi prasyarat keterlaksanaan kebijakan ini adalah pertama seluruh pengelola sekolah perlu menerima kebijakan pengembangan sekolah cerdas merupakan sumber daya yang berkontribusi positif pada peningkatan efektifitas sekolah sekolah dan menerima kebijakan itu sebagai rencana tindakan yang dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan.

Tujuan pelaksanaan program harus dipahami dengan jelas dan menjadi keputusan bersama dengan dukungan seluruh anggota komunitas sekolah sebagai bentuk kewenangan lokal yang luas menampung aspirasi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan melalui peningkatan pengetahuan secara mandiri untuk penguatan keputusan yang lebih baik dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

Kejelasan tujuan itu harus dituangkan dalam standar prosedur yang jelas dengan menekankan bahwa salah satu penentu efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh tingkat pemahaman seluruh pengelola sekolah terhadap hak dan kewajiban dalam mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan terbaiknya secara mandiri, dalam bentuk tim, dan institusi.

Bahwa keputusan yang efektif itu didukung dengan informasi dan data yang akurat dan objektif. Oleh karena itu sebelum aksi kegiatan ini dilakukan harus didukung dengan studi lapangan yang efektif untuk menentukan kebutuhan sekolah dalam mengembangkan sistem informasi pada tingkat lokal sekolah dan sistem sekolah sesuai dengan tingkat penguasaan teknis, dukungan pembiayaan, legal, dan sosial dan kultur sehingga program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penguasaan keterampilan dasar pemberdayaan komputer merupakan dasar berjalannya program ini. Untuk itu perlu ada kesungguhan seluruh anggota pengelolaan sekolah untuk meningkatkan ketergunaan computer di sekolah sebagai dasar keterlaksanaan e learning sehingga pelaksanaan training dengan menggunakan waktu di luar jam pelajaran dapat terlaksana dengan baik. Untuk pelaksanaan kebijakan ini maka seluruh sekolah harus memiliki perangkat computer dan masuk dalam akses jaringan internet.

Terdapat pihak yang dapat mendampingi sekolah mengembangkan pembelajaran dengan dukungan program e learning. Oleh karena itu seluruh pengelola sekolah perlu mendapat pendampingan secara berkelanjutan oleh tim yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kompetensi pengetahuan dan kompetensi pengembangan sistem informasi sebagai sumber belajar dalam rangka meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

E. Analisis Kelayakan

Kelayakan program ini menggunakan analisis kajian pada penelitian yang meliputi berbagai aspek kelayakan seperti yang dapat diuraikan dalam deskripsi di bawah ini.

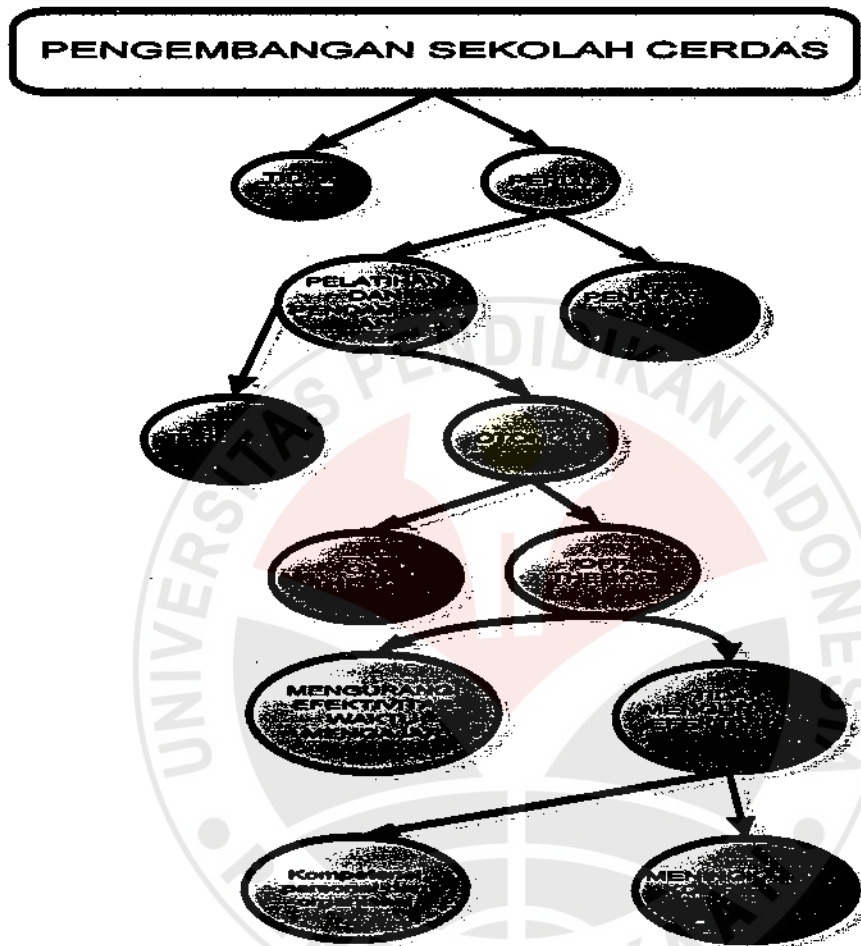
a. Kajian Kelayakan Menurut Hasil Studi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pemahaman pengelola sekolah dalam meregulasi sumber daya pendidikan terhadap efektivitas kinerja sekolah baik ditinjau dari out put maupun out come. Hal itu membuktikan bahwa pengembangan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan penguasaan informasi dan ilmu pengetahuan merupakan faktor yang strategis untuk terus mendapat perhatian pengelola kebijakan. Hasil studi ini berfungsi untuk meyakinkan bahwa meningkatkan pengetahuan pengelola sekolah merupakan sesuatu yang diperlukan.

b. Kajian Kelayakan Masalah

Dengan menggunakan analisis sederhana terdapat sejumlah masalah tentang pentingnya mengembangkan sistem informasi dalam peningkatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tingkat pemahaman pengelola sekolah yaitu bergerak seputar perlu atau tidak mengembangkan ilmu pengetahuan pengelola sekolah sudah ditegaskan hal ini sangat penting. Dengan menggunakan pendekatan adpokasi di bawah ini dicoba dianalisis seperti di bawah ini.

Gambar 5.1



Hasil analisis diagram sederhana seperti yang direkomendasikan Dunn, maka terdapat pilihan pemecahana masalah adalah perlunya pelaksanaan pengembangan sekolah cerdas dengan alternative kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan atau mentoring yang dilaksanakan secara otonom pada tingkat sekolah dalam bentuk kegiatan tidak menghentikan proses pembelajaran yang berarti guru tetap

melaksanakan pelajaran dan mampu meningkatkan kompetensi personal dan organisasi.

c. Kajian Kelayakan Teknis

Secara teknis masalah ini layak untuk dipecahkan mengingat data-data pendukung yang diperoleh melalui hasil penelitian sebagaimana tertera di bawah ini.

- dari 24 sekolah yang diteliti seluruhnya telah menjadi pengguna komputer sehingga untuk mengembangkan pendidikan dasar komputer memiliki peluang yang memadai, namun demikian untuk meningkatkan daya sekolah maka jumlah perangkat komputer di sekolah harus ditingkatkan.
- Kajian teknis untuk mendapat pelatihan kepala sekolah adalah paling tinggi dibandingkan dengan pengelola lainnya. Terdapat 33% kepala sekolah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang mendapat peluang pelatihan tinggi sampai sangat tinggi. Dan 62.5% mendapat peluang rendah hingga sangat rendah. Sementara pada kelompok guru dan staf tata usaha berpeluang mendapat pelatihan 87% mendapat peluang rendah sampai sangat rendah dan 13 % lain mendapat peluang tinggi sampai sangat tinggi. Sementara komite sekolah 96% mendapatkan peluang sangat rendah. Hanya 4 % berpeluang sangat tinggi. Dilihat dari kajian ini tingginya tingkat pelatihan yang diselenggarakan pemerintah saat ini belum memberikan peluang

kepada seluruh guru untuk mendapatkan peluang mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahamannya yang lebih baik terhadap berbagai aspek pembaharuan dalam bidang pendidikan.

- Kajian teknis keterlibatan pengelola sekolah mengikuti pelatihan menurut penyelenggaranya menunjukkan pada kelompok sangat tinggi adalah mengikuti pelatihan di tingkat propinsi dan tingkat kabupaten kota dengan angka masing-masing 42% dengan 25% di tingkat nasional sedangkan pada tingkat sekolah hanya 4%. Ini menunjukkan bahwa kemandirian sekolah masih untuk menyelenggarakan pelatihan sangat rendah. Sedangkan pada kelompok paling rendah menunjukkan mengikuti pelatihan tingkat nasional dan tingkat sekolah berada kelompok yang hampir sama yaitu 13% di tingkat nasional dan 12 % di tingkat sekolah. Jadi di sekolah kelompok yang tingkat peluang mengikuti pelatihannya rendah, mereka berpeluang rendah pula untuk mengikuti pendidikan di tingkat nasional, daerah, maupun sekolah.
- Secara teknis pengembangan mutu sumber daya manusia berbasis sekolah dengan melalui pendayagunaan teknologi menghadapi peluang yang sangat terbuka, hal ini dikaitkan dengan data bahwa seluruh SMA Negeri memiliki saluran telepon sebagai media akses internet dan perangkat komputer di sekolah.

d. Kajian Kelayakan Ekonomis

Masalah perlu tidaknya kebijakan sekolah cerdas melalui pengembangan mutu sumber daya manusia agar menjadi sekolah unggulan semakin besar peluangnya untuk mendapat dukungan. Untuk program ini peluang sekolah dapat menggunakan sumber dana dari masyarakat masih cukup besar. Peluang juga akan terasa makin besar jika diingat bahwa besarnya dana peningkatan mutu sumber daya manusia hingga saat ini belum dapat berpengaruh pada peningkatan mutu pembelajaran secara signifikan.

Dengan memperhatikan sasaran yang mendapat pembinaan selama ini melalui penataran, pelatihan jelas belum merata. Masih banyak warga sekolah yang belum mendapat peluang mendapat pembinaan. Oleh karena itu sistem pembinaan berbasis sekolah jauh lebih efisien, namun menghadapi tantangan khusus untuk menjaga mutu layanan dan mutu informasi yang diakses. Untuk itu memerlukan bantuan teknologi agar pembinaan dapat dilakukan tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Untuk itu diperlukan dukungan sistem informasi berbasis teknologi dengan lebih meningkatkan peran pengelola sekolah dalam mendayagunakan e learning.

Untuk mendorong gairah guru belajar maka dapat dikembangkan sistem penghargaan khusus kepada pengelola sekolah yang telah memiliki kompetensi mendayagunakan teknologi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sehingga dengan menjadi pengguna teknologi informasi untuk guru dapat dikaitkan dengan sertifikasi, bahkan dengan model penghargaan finansial.

Dampak yang timbul secara ekonomis akan lebih efisien karena layanan dapat dilakukan secara luas dengan keuntungan guru dan anggota komunitas sekolah dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis sekolah akan lebih banyak lagi yang terkena sasaran tanpa harus meninggalkan tugas.

e. Kajian Kelayakan Legal

Dari aspek legal pengembangan sekolah cerdas tidak memiliki hambatan yang berarti karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah cukup untuk dijadikan dasar pelaksanaan aksi kebijakan pengembangan sekolah cerdas dalam mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia pengelola sekolah.

f. Kajian Kelayakan Politik

Dukungan politik terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kota Kabupaten diperlukan terutama untuk meningkatkan dukungan financial pada peningkatan dukungan financial pada tingkat sistem sekolah. Untuk memperoleh dukungan yang diharapkan serta dikaitkan dengan kepentingan politis partai politik maupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk

mendukung program ini sangat rasional karena merek berkepentingan untuk meraih suara dan dukungan dari warga pendidikan

g. Kajian Kelayakan Substansial

Kajian aspek substansi belajar masalah ini layak untuk dipecahkan sebagaimana berbagai teori yang telah diterangkan lebih dulu bahwa kecerdasan lembaga merupakan komponen strategis yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas kinerja sekolah. Dan yang menjadi masalah utama dari kajian ini adalah bagaimana seluruh warga sekolah dapat meningkatkan kecerdasannya melalui peningkatan penguasaan data dan informasi secara berkelanjutan melalui dukungan lokal di sekolah. Untuk itu sekolah perlu mengembangkan sistem informasi sekolah yang terintegrasi dengan sistem informasi global.

Dari kelayakan substansial pengelolaan data atau informasi merupakan bagian yang sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu meningkatkan kecerdasan sekolah sebagai organisasi pendidikan jelas erat kaitannya dengan substansi sekolah dan merupakan bagian dari substansi penentu daya adaptasi terhadap lingkungan maupun daya adaptasi dengan peradaban yang terus berubah.

h. Kajian Kelayakan Keadilan dan Efisiensi

Menekankan pada pemerataan distribusi pada seluruh sasaran dengan meningkatkan keutungan untuk seluruh yang berkepentingan. Pengembangan sekolah cerdas melalui pembelajaran warga sekolah berbasis sistem informasi sekolah akan menjadi magnet belajar untuk seluruh warga sehingga ketikan ini dibangun secara intergratif dengan sistem informasi regional dan global sekaligus akan memberikan manfaat yang besar pula untuk seluruh lapisan masyarakat lainnya. Dilihat dari pengertiannya efisiensi menyangkut bagaimana input organisasi digunakan dengan tata kelola yang tepat sehingga dapat mendorong terjadinya proses yang produktif. Dengan menggunakan sumber daya input yang tidak cukup sehingga mendapatkan produk yang optimal.

i. Kajian Kelayakan Keadilan dan Etika

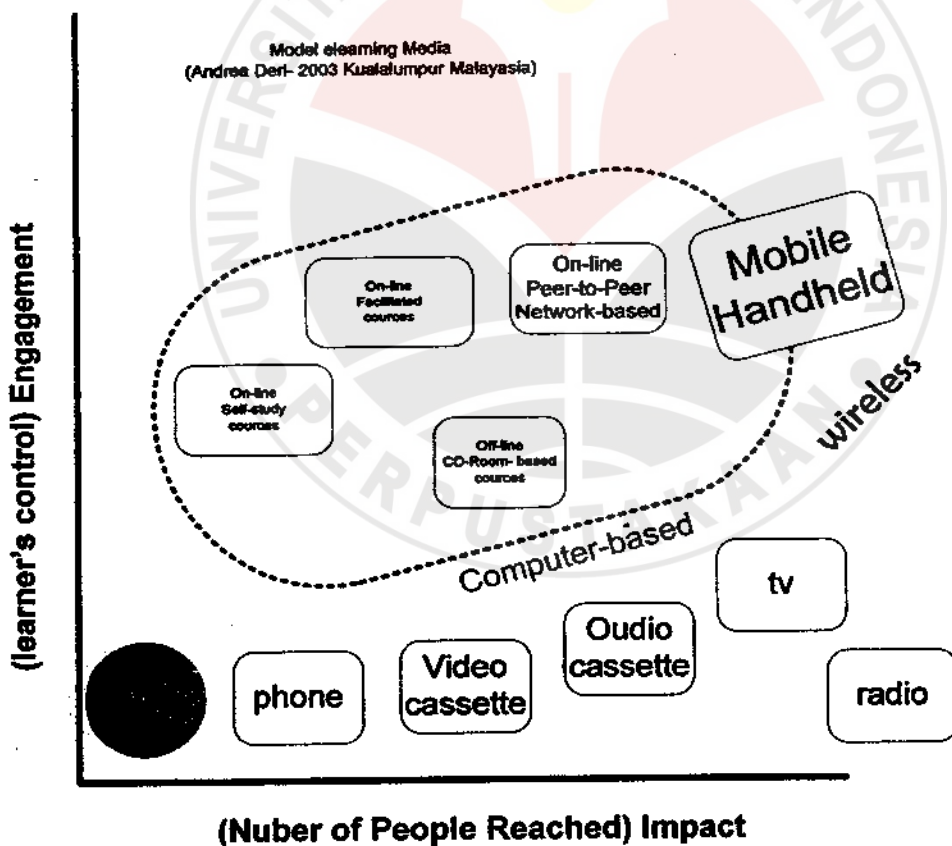
Dari aspek kelayakan keadilan dan etikan karena hal ini merupakan bagian informasi yang dikelola untuk kepentingan sekolah, maka dari aspek etika akan memberikan dampak positif terhadap public karena akan memperkokoh ketersediaan informasi yang bermoral. Dari aspek etika juga hal ini mengandung makna yang sangat berarti karena segala sesuatu yang dikembangkan disesuaikan dengan etika yang berlaku pada lingkungan yang terbatas, mana-mana informasi yang dibutuhkan akan disaring dengan tata nilai lokal sekolah.



F. Media Belajar

Untuk mengembangkan sekolah cerdas diperlukan dukungan teknologi sebagai media belajar. Seperti yang diungkapkan Melengkapi media belajar yang ada seperti perpustakaan sekolah maka perlu dikembangkan media belajar tambahan seperti diungkapkan Adrea-Deri (2003) terdiri atas perangkat komputer, radio, televise, hand phone, dan perangkat internet sebagaimana tergambar di bawah ini :

Gambar 5.2 Model Media e Learning





Pada gambar di atas terdapat dua aspek yang menjadi perhatian besar yaitu bagaimana efektivitas kendali pembelajaran dapat diimplementasikan dan pada bagian lain seberapa besar dampak positif dapat terapai. Dua variabel ini penting untuk mendapat perhatian. Kontrol yang dimaksud di sini tidak hanya dalam bentuk evaluasi pelaksanaan melainkan meliputi pengaturan ketepatan penentuan tujuan sesuai dengan tingkat kebutuhan pada tiap sekolah, control terhadap sarana yang dibutuhkan, control terhadap silabus yang digunakan, dana yang tersedia, serta kedali mutu mentoring dan tindak lanjut kebijakan yang dilaksanakan melalui pendekatan multi tahun.

G. Siklus Aksi Kebijakan

Aksi kebijakan pengembangan sekolah cerdas melalui program pembelajaran pengelola sekolah berbasis sistem informasi merupakan program multi tahun dengan pendekatan partisipasi seluruh waga sekolah sebagai bagian dari implementasi manajemen berbasis sekolah. Kemandirian belajar dalam kerja sama tim yang diintegrasikan dalam sistem sekolah dan sistem informasi nasional dan global merupakan inti strategi yang dikembangkan sebagai solusi terhadap ketertutupan sekolah maupun guru-guru yang selama ini bekerja masing-masing.

Pada lokal sekolah tahap-tahap kegiatan meliputi :

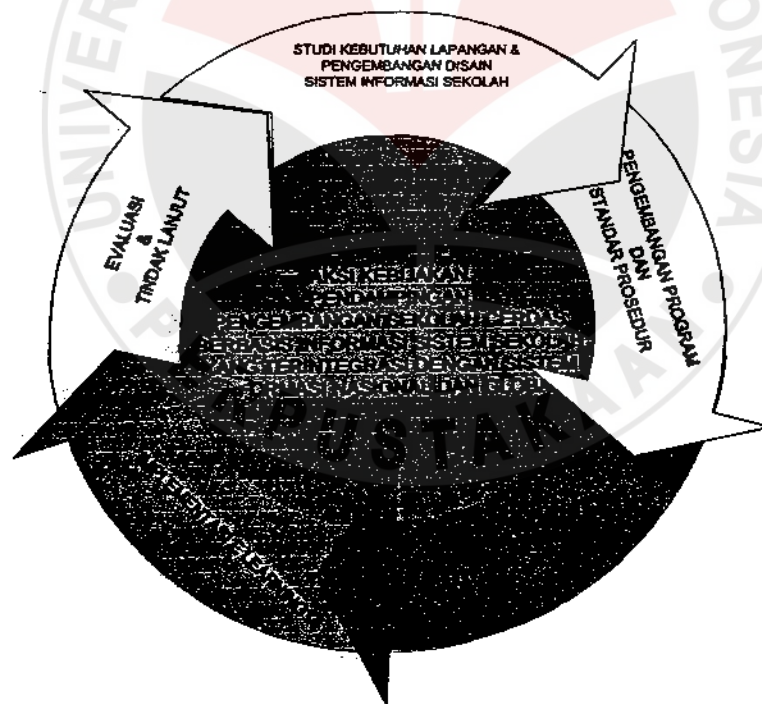
- 1) Studi kebutuhan lapangan dan disain sistem informasi.
- 2) Pengembangan program dan standar prosedur oprasional.



- 3) Pelatihan pendayagunaan komputer dan pengelolaan data berkelanjutan
- 4) Implementasi e learning
- 5) Mentoring dan pendampingan

Untuk memfasilitasi tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan berkelanjutan maka dirancang proses kegiatan melalui 5 siklus seperti yang tergambar di bawah ini.

Gambar 5. 3 Siklus Program Pengembangan Sekolah Cerdas Melalui Pengembangan Pembelajaran Berbasis Sistem Infomasi Sekolah



Pada gambar di atas terdeskripsikan lima tahap kegiatan dalam setiap siklus yang berdurasi satu tahun. Dengan demikian siklus akan otomatis berubah sejalan dengan perubahan tahun anggaran sekolah. Evaluasi juga dilaksanakan dalam periode kegiatan satu tahun pelajaran.

KEGIATAN TAHAP I :

Studi Lapangan yang dilakukan oleh pengelola sekolah dan mengembangkan disain sistem informasi sekolah.

a. Studi Lapangan

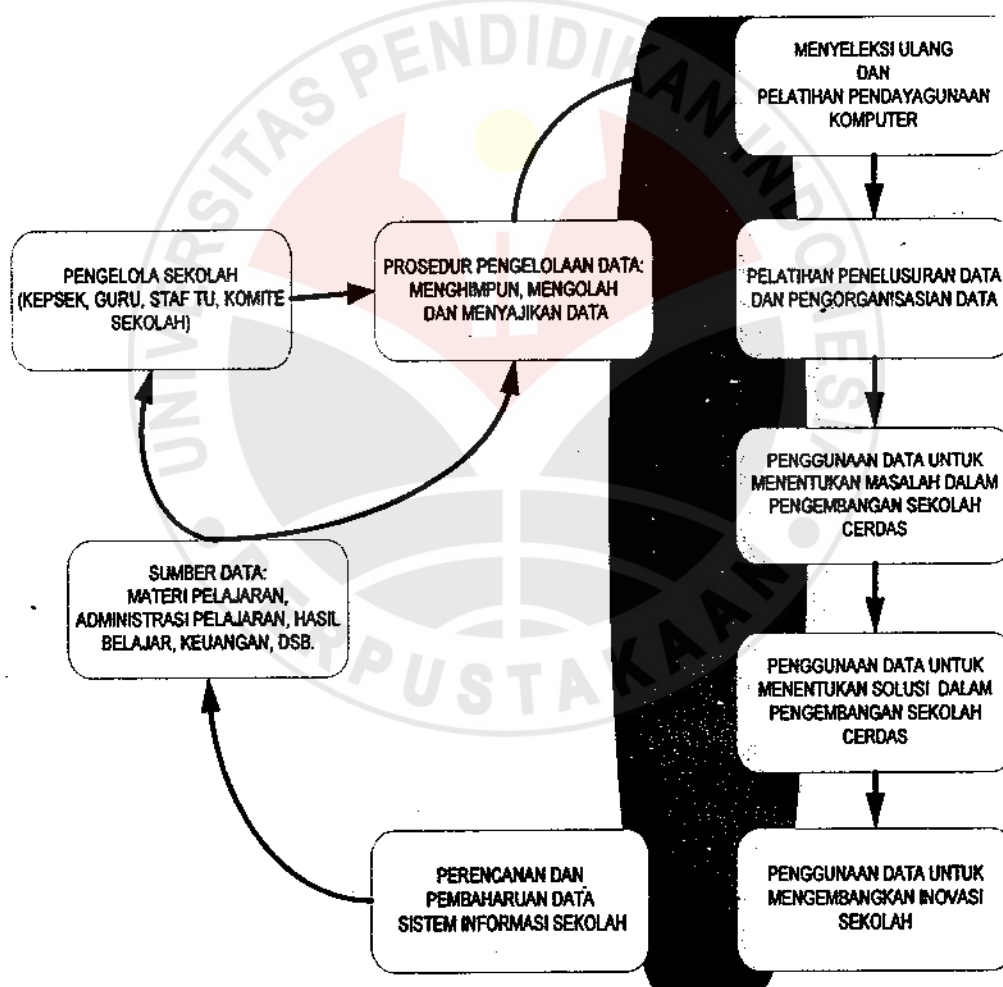
Dalam studi lapangan ini diawali dengan pembentukan tim persiapan pengembangan sekolah cerdas. Tim bertugas untuk menyusun profil sekolah. Perumusan profil didukung dengan langkah awal pengumpulan data sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan. Sebelum kebijakan ditetapkan maka tim perlu merumuskan terlebih dahulu harapan-harapan yang ada hendak diwujudkan oleh seluruh komunitas sekolah.

b. Pengembangan Disain Sistem Informasi

Pengambilan keputusan tanpa dukungan data yang bermutu akan menghasilkan keputusan yang tidak bermutu. Pernyataan itu menegaskan bahwa dalam pengembangan sekolah ke depan diperlukan kecerdasan sekolah untuk mengkoleksi data yang bermutu. Untuk mendapatkan data yang bermutu dalam aksi kebijakan ini,

akan ditempuh standar prosedur dengan alur program mengacu pada model yang digunakan *Promoting the Quality and Use Of National Reporting System Data* (Washington: 2002). Ada pun susunan kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.5 Model Penyajian Data Berkualitas dan Model Pendayagunaan Data



Gambar di atas mendeskripsikan alur perencanaan pengelolaan data, latihan pengelolaan data, mengoleksi data, menggunakan data, membaharui data berada dalam siklus yang bersistem dan terintegrasi sebagai sistem informasi sekolah untuk meningkatkan mutu keputusan dalam rangka meningkatkan mutu kebijakan lokal secara berkelanjutan.

KEGIATAN TAHAP II

Penyusunan Program Pengembangan Sistem Informasi Sekolah dan Standar Prosedur Pelaksanaan Program Pengembangan sistem informasi sekolah

Berdasarkan data yang telah dikoleksi dan telah tersusun dalam bentuk profil sekolah, tim pengembang merumuskan program yang selanjutnya program dibawa ke dalam forum musyawarah pendidikan di sekolah untuk disepakati bersama. Bersamaan dengan dirumuskan pula standar prosedur untuk mengembangkan sekolah cerdas dengan sekurang-kurangnya memuat visi sekolah, tujuan program, analisis masalah yang dihadapi, menetapkan strategi yang akan digunakan, menetapkan indikator keberhasilan, pengorganisasian kegiatan, pelaksana kegiatan dan sumber pembiayaan.

Penyusunan program melibatkan seluruh unsure pengelola sekolah dengan mengedepankan keterbukaan, demokratis, berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan informasi dan berbasis data.

KEGIATAN TAHAP III

Pelatihan pendayagunaan komputer dan pengelolaan data secara berkelanjutan

Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelatihan on the job training di sekolah dengan jadwal yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu guru-guru.

Ada pun materi pelatihan meliputi :

- a) Pelatihan dasar penggunaan komputer
- b) Pengolahan data dan penyajian informasi tertulis
- c) Pelatihan pengelolaan dan manajemen dokumen
- d) Pendayagunaan internet sebagai media belajar dalam rangka meningkatkan kapasitas daya baca warga sekolah.
- e) Pengembangan interaksi dalam konteks sistem sekolah dan kerja sama tim berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- f) Pengembangan sistem informasi sekolah berbasis web.

Dengan materi seperti di atas, maka siklus kegiatan sekurang-kurangnya menggunakan kegiatan multi tahun dan di setiap sekolah dapat berjalan sesuai dengan kemampuan guru dan seluruh pengelola untuk melakukannya namun antar sekolah dikembangkan sistem kompetitif dalam kerja sama tim.

- g. Evaluasi yang dikembangkan dengan berdasar pada indikator kinerja yang ditetapkan bersama.

KEGIATAN TAHAP IV

Impelementasi e learning

Implementasi e learning dan pendayagunaan informasi dalam meningkatkan kecerdasan personal dan organiasi dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan informasi WEB
- 2) Pendayagunaan perpustakaan on line
- 3) Penyajian materi pelajaran berbasis web
- 4) Komunikasi pembelajaran berbasis web
- 5) Pengelolaan administrasi pembelajaran berbasis web
- 6) Pengelolaan administrasi sekolah berbasis web
- 7) Pelayanan orang tua siswa berbasis web
- 8) Kerja sama antarlembaga dalam pengembangan kompetensi siswa.

KEGIATAN TAHAP V

Mentoring dan Pendampingan

Mentoring dan pendampingan pada prinsipnya dilakukan secara simultan dari sejak pelaksanaan program, pelatihan pendayagunaan computer, aplikasi e learning dan evaluasi serta tindak lanjut kegiatan oleh tim ahli yang ditunjuk khusus untuk meningkatkan kompetensi pengelola sekolah maupun pendampingan dalam

penyediaan perangkat lunak sistem informasi sekolah. Pendampingan dan mentoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memelihara ritme pelaksanaan kegiatan berkelanjutan. Setiap siklus dilaksanakan dalam satuan waktu tahun pelajaran sehingga pendanaan kegiatan diintegrasikan ke dalam anggaran setiap tahun secara berkelanjutan.

Pendampingan dilakukan oleh tim yang dilakukan oleh pihak yang ditentukan oleh sekolah atau difasilitasi oleh pihak perguruan tinggi yang secara profesional memiliki keahlian khusus dalam bidang pengembangan teknologi informasi dan dalam bidang manajemen pendidikan.

EVALUASI

Evaluasi kegiatan pada prinsipnya dilakukan sepanjang pelaksanaan kebijakan pengembangan sekolah cerdas. Evaluasi kegiatan diarahkan pada pengukuran indikator pencapaian target kebijakan yang telah ditentukan sebelum melaksanakan kebijakan.

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara bertahap dari mulai kegiatan langkah pengkoleksian data analisis lingkungan, pengembangan profil sekolah, analisis masalah utama yang menjadi tantangan.

Pada setiap tahap kegiatan sebelum aksi kebijakan dilaksanakan sekolah menentukan indikator target pencapaian yang diharapkan berdasarkan pengujian

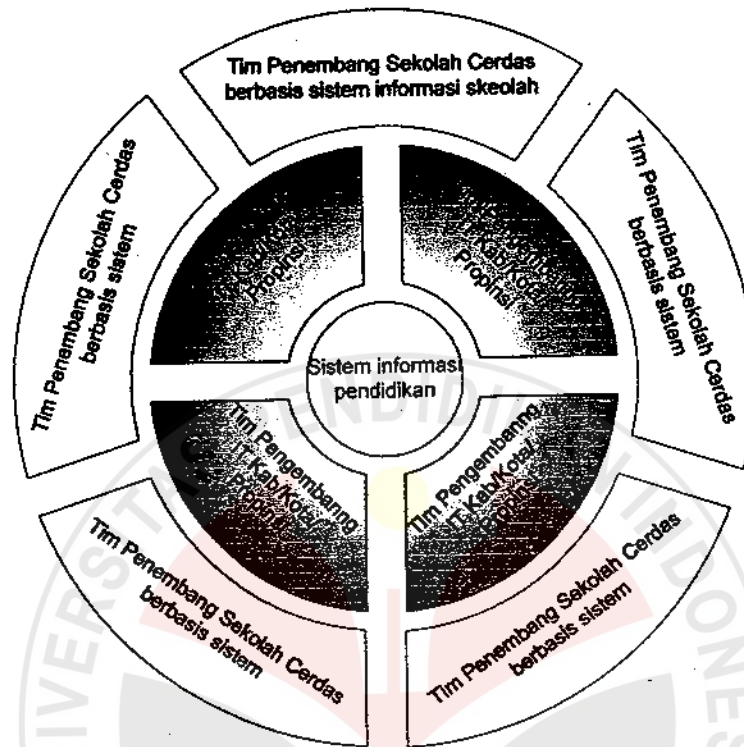
realita yang ada dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Dari itu diharapkan lahir keputusan-keputusan evaluasi secara kuantitatif.

H. Pelaksana

- 1) Pada setiap sekolah terdapat tim pengembang program dan tim pelaksana program dengan dukungan seluruh unsure pengelola sekolah.
- 2) Mentor yang berkeahlian pendayagunaan computer sebagai media belajar dalam mengarahkan pengeloala sekolah mengelola data sekolah dan memberi bimbingan teknis untuk melakukan pembelajaran denga sistem e learning.
- 3) Tim pengembang sistem informasi pada level kabupaten kota yang terdiri atas unsur sekolah, dinas pendidikan, mentor tingkat kabupaten kota, dan konsultan pengembangan sistem informasi, dan unsur perguruan tinggi.
- 4) Tim pengembang sistem informasi pada level propinsi.
- 5) Tim pengembang sistem informasi pada level nasional.

Untuk memberikan gambaran bagai mana sistem ini bekerja makan di bawah ini digambarkan bahwa pengembangan sekolah cerdas harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Ada pun gambaran itu dapat dilihat dari integrasi sistem sebagai berikut :

Gambar 5.4 Kompen Sistem Pengembang Sekolah Cerdas



Gambar di atas menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi sekolah harus menjadi bagian integral dari pengembangan sistem informasi pada tingkat kabupaten kota, propinsi, nasional dan global.

I. Pembiayaan

Sumber biaya yang dialokasikan untuk kegiatan ini diharapkan diperoleh dari partisipasi masyarakat, pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kota dan kabupaten, dan anggaran sekolah.